



**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA UMUM
TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI DALAM PUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA DINAS
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Acep Suhendar

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) YPPT Priatim Tasikmalaya

Acepsuhendar2002@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini berjudul : Pengaruh Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Organisasi dalam Pungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Penentuan judul tersebut dikarenakan ditemukan indikator-indikator masalah yang berkaitan dengan efektivitas organisasi dalam pungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.

Dari fenomena tersebut diatas, diduga karena kurang optimalnya Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum. Adapun untuk rumusan masalahnya adalah : Seberapa besar pengaruh Pengaruh secara simultan dan parsial dari Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Organisasi Dalam pungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya sudah baik, artinya Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum sudah baik dilaksanakan dengan menerapkan dimensi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Efektivitas Organisasi dalam Pungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya berada sudah baik. Secara simultan dan parsial Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum berpengaruh terhadap Efektivitas Organisasi dalam Pungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Efektivitas organisasi dan Dalam pungutan Retribusi



ABSTRACT

This article is entitled: The Effect of Public Service Retribution Policy Implementation on the Effectiveness of Parking Service Charges on the Edge of Public Roads at the Department of Transportation, Communication and Information Technology of Tasikmalaya Regency. The determination of the title is because it is found that indicators of problems related to the effectiveness of levy levies on parking services on the edge of public roads at the Department of Transportation, Communication and Information of Tasikmalaya Regency.

From the above phenomenon, it is suspected that the policy implementation of the Public Service Retribution is less than optimal. As for the formulation of the problem is: How much influence does the simultaneous and partial influence of Policy Implementation of Public Service Retribution on the Effectiveness of Levy Collections for Parking Services on the Edge of Public Roads at the Department of Transportation, Communication and Information of Tasikmalaya Regency.

Based on the results of the study, it shows that the policy implementation of Public Service Retribution at the Department of Transportation, Communication and Information of Tasikmalaya Regency is good, meaning that the policy implementation of Public Service Retribution has been well implemented by applying the dimensions of communication, resources, attitudes Implementing and Bureaucratic Structure. Effectiveness of the levy for parking services on the edge of public roads at the Department of Transportation, Communication and Information of Tasikmalaya Regency is already good. Simultaneously and partially the Implementation of the General Services Levy Policy affects Effectiveness of the levy for parking services on the edge of public roads at the Department of Transportation, Communication and Information of Tasikmalaya Regency.

Keywords: Policy Implementation, Effectiveness and Levy Collection

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut bukan hanya merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah semata. Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dari berbagai aspek merupakan suatu tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkannya karena membutuhkan dana yang cukup besar. Oleh karena itu perlu digali sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Sumber pendapatan daerah digali dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan kemampuan yang dimilikinya melalui suatu kebijakan Pemerintah Daerah. Salah satu sumber pendapatan yang mempunyai kontribusi signifikan terhadap pembangunan di daerah yaitu Retribusi Jasa Umum. Retribusi jasa umum didefinisikan dengan bentuk dari pungutan daerah yang merupakan pembayaran untuk layanan jasa atas penyediaan fasilitas ataupun barang yang dimaksudkan untuk kemanfaatan atau kepentingan umum yang dapat individu ataupun badan nikmati atau gunakan. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 tahun 2011



tentang Retribusi Jasa Umum menyebutkan bahwa salah satu yang termasuk kedalam Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pelaksanaan pengelolaan Retribusi Parkir di Kabupaten Tasikmalaya menjadi kewenangan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Parkir. Hasil yang diterima dari retribusi ini akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Implementasi dari pemungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum harus dilaksanakan secara efektif sehingga target dari retribusi ini dapat tercapai guna berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, guna menunjang hal tersebut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya telah berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang didalamnya mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Berdasarkan hasil pengamatan awal penulis, ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan belum efektifnya organisasi dalam pungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum di Kabupaten Tasikmalaya antara lain sebagai berikut:

1. Target pungutan retribusi pelayanan parkir tidak tercapai, salah satu tolok ukur keberhasilan dari suatu kegiatan yaitu dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya target kegiatan tersebut. Pungutan retribusi pelayanan parkir di Kabupaten Tasikmalaya dari 4 tahun terakhir tidak memenuhi target.
2. Ketidaktepatan waktu dalam melakukan penyetoran, contohnya masih terdapat pegawai parkir yang

terlambat dalam menyetorkan hasil pungutannya.

Mengacu pada berbagai uraian yang peneliti paparkan, dengan ini peneliti berkeinginan guna melaksanakan penelitian yang berjudul: “Pengaruh Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Terhadap Efektivitas Organisasi Dalam Pungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai pengaruh implementasi kebijakan retribusi jasa umum terhadap efektivitas organisasi dalam pungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan publik dalam penyelenggaraan pemerintah berperan begitu penting karena menyangkut kepentingan umum sehingga dampak yang ditimbulkan sangat luas dan beraneka ragam. Kebijakan publik harus dapat dirumuskan dengan jelas sehingga dapat dilihat, ditelaah dan dievaluasi kemudian diimplementasikan dengan efektif. Dye dalam (Mangkunagara, 2003, p. 3) mengemukakan bahwa kebijakan publik didefinisikan apa yang nantinya akan dilaksanakan serta apa yang tidak dilaksanakan oleh pihak pemerintah. Kebijakan publik ini ialah sebagai usaha guna mengartikan ataupun memahami apa yang semestinya akan dilaksanakan dengan apa yang tidak semestinya pihak lakukan berkenaan dengan permasalahan tertentu, apa yang dapat mempengaruhi atau yang menyebabkan, serta apa dampak atau pengaruh yang kebijakan publik tersebut timbulkan.



Implementasi kebijakan harus dinilai dan dikembangkan dalam kaitannya dengan kemampuan implementator dalam menyampaikan seluruh isi pesannya dengan baik sehingga seluruh program kerja dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Untuk mencermati lebih jauh terkait dengan implementasi kebijakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu beberapa konsep tentang implementasi kebijakan. Selanjutnya (Siagian, 2002, p. 231) mendefinisikan bahwa Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Kemudian (Winarno, 2005, p. 101) mengemukakan pendapatnya tentang implementasi kebijakan dengan menyatakan bahwa implementasi kebijakan dalam definisi luasnya ialah sebagai alat administrasi hukum, yang mana bahwa terdapat beberapa faktor, prosedur, organisasi serta teknik yang secara bersama-sama bekerja guna melaksanakan suatu kebijakan agar dapat menghasilkan dampak ataupun tujuan yang diharapkan dan yang direncanakan.

Berlandaskan pendapat di atas, maka implementasi kebijakan adalah suatu pelaksanaan terhadap ketetapan kebijakan baik secara individu atau kelompok, dimana terdapat beberapa faktor, prosedur, organisasi serta teknik yang secara bersama-sama bekerja guna melaksanakan suatu kebijakan agar dapat menghasilkan dampak ataupun tujuan yang diharapkan dan yang direncanakan. Lazimnya kebijakan ini akan dapat mengidentifikasi permasalahan yang ingin dipecahkan dan beberapa cara tertentu dalam menuntaskannya, implementasi

kebijakan perlu dilakukan dengan komunikasi dan saling pengertian dari para pelaku, dengan demikian pesannya dapat diterima dan tersampaikan secara jelas.

Kebijakan publik ini pada dasarnya berisiko mengalami kegagalan. Implementasi kebijakan didefinisikan dengan serangkaian aktivitas yang sebelumnya telah dirumuskan kebijakannya, dengan tidak adanya pelaksanaan, maka kebijakan tersebut nantinya tidak akan membuahkan hasil. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan ini kedudukannya dalam kebijakan Negara sangat fundamental, setiap orang yang bertanggung jawab dan terkait atas kegiatan tersebut harus memiliki dan menggambarkan hasil kebijakan agar mereka dapat bekerja secara efektif. Maka pelaksana yang terkait harus menerima komunikasi yang jelas, akurat, dan konsisten dari ketentuan pelaksanaan kegiatan.

Sebagaimana diungkapkan (Islami, 2001, p. 107) yang menyebutkan bahwa sebuah kebijakan akan dapat menjadi efektif jika dijalankan dan berdampak baik dan positif untuk para anggota masyarakat. Di lain sisi, kesuksesan dari implementasi kebijakan ini bergantung terhadap beberapa pihak yang mempunyai keahlian dan kemampuan dalam menjalankan berbagai program yang sebelumnya sudah dirancang, dengan demikian ini akan dapat mengukur seberapa besar kesuksesan program yang dijalankan tersebut. Ini nantinya akan dapat memperlihatkan hasil atas kebijakan yang berpengaruh terhadap pencapaian hasilnya dibandingkan dengan kebijakan yang sudah dirancang serta hal ini akan diselaraskan dengan proses pengkonversian dalam suatu mekanisme sistem, dengan demikian hasilnya akan sejalan dengan cita-cita dan target yang

akan dipenuhi dengan rumusan kebijakan ini.

Menurut Edward III dalam (Widodo, 2009, p. 98) terdapat empat syarat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dapat berdampak pada keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan., yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi, yakni kejelasan yang harus disampaikan oleh pelaksana kebijakan
2. Sumber daya, yakni sarana dan prasarana yang tersedia untuk dapat mendukung dan memperlancar pelaksanaan kebijakan
3. Disposisi atau sikap pelaksanaan, yakni adanya keinginan atau kesepakatan di kalangan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan
4. Struktur birokrasi, yakni tata kerja dalam organisasi untuk mempermudah/memperlancar kebijakan.

Efektivitas ialah sebagai unsur yang fundamental dalam suatu perusahaan atau organisasi, hal ini dikarenakan bahwa terpenuhinya target atau tujuan ini ditentukan dengan keefektivitasan dari para karyawan yang terdapat dalam organisasi tersebut. Lebih jelasnya, ini dapat dinyatakan efektif jika sasaran atau tujuannya terpenuhi dengan apa yang direncanakan atau diharapkan. (Sedarmayanti, 2001, p. 59) mengemukakan efektivitas didefinisikan dengan ukuran yang menggambarkan seberapa jauh bahwa tujuan atau target tersebut dapat terpenuhi. Definisi dari efektivitas ini lebih berorientasikan pada hasil, sementara itu masalah dalam penggunaan masukan ini masih kurang menjadi perhatian utamanya. Jika efisiensi ini dihubungkan dengan efektivitas, dengan demikian, walaupun efektivitas ini meningkat, ini belum

secara langsung menyebabkan efisiensi mengalami peningkatan. Selanjutnya (Sharma, 2002, p. 314) mengemukakan bahwa Efektivitas Organisasi adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi (target) atau dengan rumus $E = R/T$. E:Efektivitas, R:Realisasi, T:Target. R adalah proses dalam hal ini proses produksi, dan setiap proses terdiri dari input, throughput dan output.

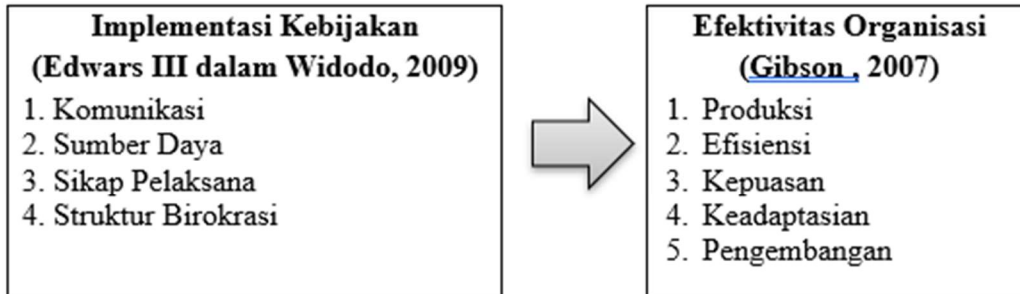
Adapun indikator efektivitas organisasi menurut (Gibson, 2007, p. 32) adalah “Indikator ini sifatnya jangka pendek dan meliputi ukuran mengenai produksi, efisiensi, dan kepuasan. Dua kriteria lain yang berjangka waktu menengah adalah menyesuaikan diri dan pengembangan”.

Dari lima indikator efektivitas di atas selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Produksi yaitu Kapasitas organisasi untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas output yang dibutuhkan oleh lingkungan tercermin dalam produksi.
2. Efisiensi yaitu Perbandingan output dengan input adalah bagaimana efisiensi didefinisikan. Siklus lengkap input, pemrosesan, dan output adalah fokus utama dari kriteria ini.
3. Kepuasan dan moral adalah ukuran untuk menunjukkan Sejauh mana suatu organisasi memenuhi persyaratan tenaga kerjanya.
4. Keadaptasian yaitu sejauh mana suatu organisasi benar-benar mampu menanggapi perubahan internal dan eksternal.

5. Pengembangan, kriteria ini mengukur kapasitas organisasi untuk memenuhi tuntutan

lingkungan dengan meningkatkan kemampuannya.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

METODE PENEILITAN

eksplanatori research digunakan dalam penelitian ini, karena tidak hanya menggambarkan fakta-fakta empiris yang ditemui di lapangan, tetapi juga bermaksud menganalisis dan menjelaskan pengaruh antar satu variabel dengan variabel lainnya (Uchjana Effendy, 2011).

Selanjutnya dengan menggunakan metode ini peneliti menguraikan operasionalisasi variabel yang berpusat pada indikator, sehingga mungkin cukup untuk digunakan sebagai desain model uji statistik menggunakan analisis jalur. Analisis jalur adalah analisis hubungan sebab akibat dengan tujuan untuk memisahkan pengaruh langsung dan tidak langsung suatu variabel kausal terhadap variabel pengaruh.

Penggunaan metode ini untuk menganalisis data yang terhimpun,

sehingga sampai pada kesimpulan yang logis dan realistis. Selanjutnya dalam penggunaan metode ini juga diarahkan pada usaha untuk menjelaskan dan menentukan besar kecilnya pengaruh implementasi kebijakan (variabel X) terhadap Efektivitas Organisasi Dalam Pungutan retribusi parkir (variabel Y).

Populasi (Sugiyono, 2018, p. 117), didefinisikan dengan wilayah yang digeneralisasikan, yang di dalamnya terdiri atas subjek dan ataupun objek yang memiliki karakteristik serta kuantitas tertentu yang peneliti tentukan, agar nantinya dapat dipelajari dan dialami serta dihasilkan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 78 orang pegawai.

Tabel Populasi Penelitian

No	Bagian / Seksi	Jumlah
1	Sekretariat	14
2	Bidang Angkutan	7
3	Bidang Lalu Lintas	11
4	Bidang Sarana dan Prasarana	6



No	Bagian / Seksi	Jumlah
5	Bidang Informatika dan Persandian	4
6	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5
7	UPTD PKB	12
8	UPTD Parkir	3
9	UPTD Terminal	16
Jumlah		78

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya, 2022

Adapun teknik sampling yang digunakan penulis adalah teknik sensus atau sampling jenuh. yang menurut (Sugiyono, 2016, p. 83) adalah bahwa seluruh populasi mendapat kesempatan yang sama untuk dijadikan responden. Berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jadi populasinya sebanyak 78 orang dan penulis menetapkan responden sebanyak 78 orang responden yang di sebarakan dengan angket dan 1 responden yaitu Kepala Dinas dilakukan dengan cara wawancara. dengan pertimbangan bahwa responden penelitian yang dipilih dinyatakan berkompeten dan memiliki banyak pengetahuan terhadap permasalahan yang tengah dihadapi ataupun ditentukan terhadap beberapa kriteria sebagaimana di bawah ini:

1. Dilihat berdasarkan waktu, dana dan tenaga
2. Sempit atau luas wilayah pengamatannya atas tiap subjek, hal ini dikarenakan memiliki pengaruh terhadap banyak atau sedikit tentang data penelitian

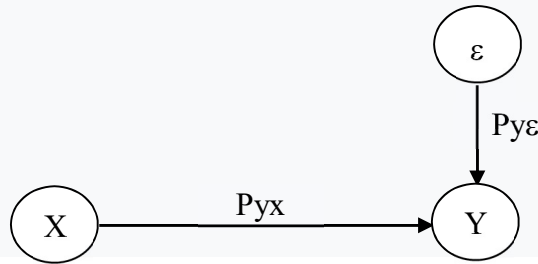
Teknik pengumpulan data penelitiannya ialah dengan menggunakan beberapa cara, di antaranya ialah sebagaimana di bawah ini:

1. Studi kepustakaan dan studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari sebagai literatur, jurnal, makalah ilmiah, serta berbagai peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

2. Studi lapangan yaitu mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data, menyeleksi secara langsung terhadap objek yang sedang dilakukan penelitian pada lokasi penelitian dengan cara sebagaimana di bawah ini:

- a. Observasi ini dilaksanakan dengan melaksanakan pengamatan pada objek penelitian yang nantinya akan diteliti secara langsung;
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
- c. Angket, yaitu dengan mengajukan sejumlah pernyataan yang ditujukan kepada responden dengan disertai beberapa alternatif pilihan dalam daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh penulis.

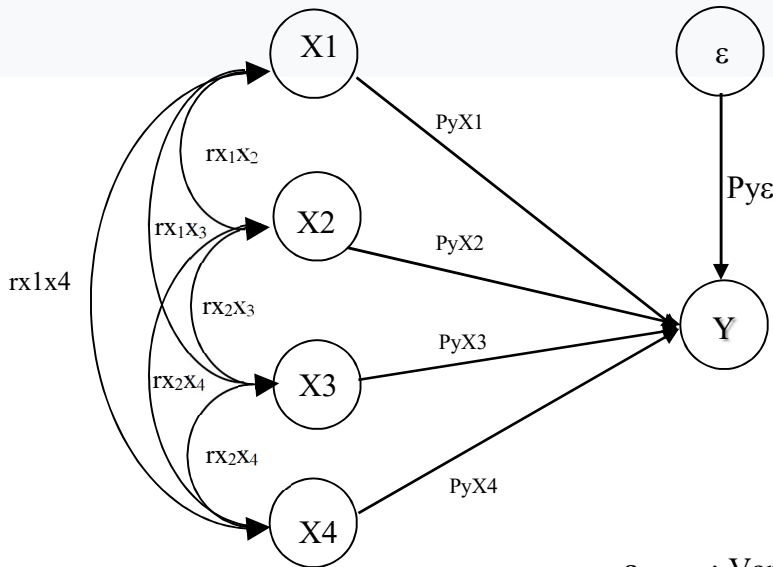
Hasil kuesioner perlu dianalisis untuk mengetahui apakah data diperoleh dengan menggunakan alat ukur (kuesioner) yang sesuai (valid), handal (reliable), konsisten (internal consistency). Alhasil, semua akan dianalisis menggunakan rumus yang tepat dan bisa dimengerti. Analisis dalam pengolahan data menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis) yaitu melihat besarnya pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y.



Struktur Pengaruh X terhadap Y

Keterangan :

- X = Implementasi Kebijakan
- Y = Efektivitas Organisasi
- ϵ = Epsilon



Struktur Jalur Pengaruh Parsial Variabel X1 sampai dengan X3 terhadap Y

Keterangan:

- X1 : Komunikasi
- X2 : Sumber daya
- X3 : Disposisi atau sikap pelaksana
- X4 : Struktur birokrasi
- Y : Efektivitas Organisasi

Dalam Pungutan

ϵ : Variabel lain yang tidak diuji

HASIL PENELITIAN

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini diperlukan pengolahan data dengan menggunakan analisis jalur dan program SPSS. Adapun hasil dari penelitian ini dapat dilihat dari perhitungan nilai koefisien jalur antara variabel X dan variabel Y sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel pengaruh X1, X2, X3, X4 terhadap Y

No	Nama Variabel	Formula	Hasil
1	Komunikasi		
	a. Pengaruh Langsung X1 terhadap Y	(0,186) (0,186)	0,035

	b. Pengaruh Tidak Langsung X1 Melalui X2	(0,186) (0,652) (0,297)	0,036
	c. Pengaruh Tidak Langsung X1 Melalui X3	(0,186) (0,646) (0,149)	0,018
	d. Pengaruh Tidak Langsung X1 Melalui X4	(0,186) (0,723) 0,357)	0,048
	Pengaruh Total X1 Terhadap Y	0,035 + 0,036 + 0,018 + 0,048	0,137
2	Sumber Daya		
	e. Pengaruh Langsung X2 terhadap Y	(0,297) (0,297)	0,088
	f. Pengaruh Tidak Langsung X2 Melalui X1	(0,297) (0,652) (0,186)	0,036
	g. Pengaruh Tidak Langsung X2 Melalui X3	(0,297) (0,738) (0,149)	0,033
	h. Pengaruh Tidak Langsung X2 Melalui X4	(0,297) (0,568) 0,357)	0,060
	Pengaruh Total X2 Terhadap Y	0,088 + 0,036 + 0,033 + 0,060	0,217
3	Disposisi atau Sikap Pelaksana		
	i. Pengaruh Langsung X2 terhadap Y	(0,149) (0,149)	0,022
	J. Pengaruh Tidak Langsung X3 Melalui X1	(0,149) (0,646) (0,186)	0,018
	k. Pengaruh Tidak Langsung X3 Melalui X2	(0,149) (0,738) (0,297)	0,033
	l. Pengaruh Tidak Langsung X3 Melalui X4	(0,149) (0,590) (0,357)	0,031
	Pengaruh Total X3 Terhadap Y	0,022 + 0,018 + 0,033 + 0,031	0,103
3	Struktur Birokrasi		
	m. Pengaruh Langsung X2 terhadap Y	(0,357) (0,357)	0,127
	n. Pengaruh Tidak Langsung X3 Melalui X1	(0,357) (0,723) (0,186)	0,048
	o. Pengaruh Tidak Langsung X3 Melalui X2	(0,357) (0,568) (0,297)	0,060
	p. Pengaruh Tidak Langsung X3 Melalui X4	(0,357) (0,590) (0,149)	0,031
	Pengaruh Total X4 Terhadap Y	0,127 + 0,048 + 0,060 + 0,031	0,267
	Pengaruh Total X1, X2, X3, X4 Terhadap Y	0,137 + 0,217 + 0,103 + 0,267	0,724
	Pengaruh Lain yang Tidak diteliti	1 - 0,724	0,276

Berdasarkan perhitungan diatas maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan retribusi jasa umum secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas organisasi dalam pungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya sebesar 0,724 atau sebesar 72,4% sementara sisanya yaitu sebesar 27,6% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti.

Besarnya pengaruh parsial dari masing-masing sub variabel implementasi kebijakan retribusi jasa umum terhadap efektivitas organisasi dalam pungutan retribusi jasa parkir ditepi jalan umum pada Dinas

Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Besarnya pengaruh dimensi komunikasi terhadap efektivitas organisasi dalam pungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya sebesar 0,137 yang artinya dimensi komunikasi berkontribusi sebesar 13.7% dalam upaya mencapai efektivitas organisasi dalam pungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.
2. Besarnya pengaruh dimensi sumberdaya terhadap efektivitas organisasi dalam pungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum di

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya sebesar 0,217, yang artinya dimensi sumberdaya berkontribusi sebesar 21,7% dalam upaya mencapai efektivitas organisasi dalam pungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.

3. Besarnya pengaruh dimensi disposisi terhadap efektivitas organisasi dalam pungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum di faktor sumber daya sebesar 0,103 yang artinya dimensi disposisi berkontribusi sebesar 10,3% dalam upaya mencapai efektivitas organisasi dalam pungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.
4. Besarnya pengaruh dimensi struktur birokrasi terhadap efektivitas organisasi dalam pungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum di faktor sumber daya sebesar 0,267 yang artinya dimensi struktur birokrasi berkontribusi sebesar 26,7% dalam upaya mencapai efektivitas organisasi dalam pungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.

PEMBAHASAN

Dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum melalui faktor komunikasi mempunyai pengaruh sebesar 13,7% terhadap efektivitas organisasi dalam pungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan telah berjalan dengan baik.

Faktor kedua dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan retribusi jasa umum yaitu faktor sumber daya. Dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum melalui faktor sumber daya mempunyai pengaruh

sebesar 21,7% terhadap efektivitas organisasi dalam pungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan sarana prasarana yang telah memadai.

Faktor ketiga dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan retribusi jasa umum yaitu faktor disposisi. Dimana dari hasil penelitian ini memberikan pengaruh yang paling kecil terhadap efektivitas organisasi dalam pungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya yaitu sebesar 10,3%. Disposisi atau sikap pelaksana, dalam hal ini para pegawai tentu harus mengetahui mengenai tanggungjawabnya dan harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan tugasnya.

Para pegawai tidak dapat menolak terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi, karena sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah terikat dengan sumpah jabatan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, setiap pegawai dituntut untuk dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari kemampuan kerja pegawainya, demikian juga dalam mencapai tujuan penyelenggaraan retribusi parkir di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.

Faktor keempat dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan retribusi jasa umum yaitu struktur birokrasi. Dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum melalui faktor struktur birokrasi mempunyai pengaruh yang paling besar yaitu 26,7% terhadap efektivitas organisasi dalam

pungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembagian tugas atau kejelasan dalam pelaksanaan tugas mengenai pelaksanaan retribusi parkir sangat penting bagi efektivitas organisasi dalam pungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.

Dari keempat faktor Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum yang dijadikan dasar penelitian ini, masing-masing faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap efektivitas organisasi dalam pungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum berpengaruh sebesar 72,4% terhadap efektivitas organisasi dalam pungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun untuk hasil epsilon-nya berkontribusi sangat rendah yaitu sebesar 27.6%

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas organisasi dalam pungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Artinya efektivitas

organisasi dalam pungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dapat dipengaruhi oleh adanya faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Selanjutnya dari hasil penelitian ini secara parsial faktor disposisi memiliki pengaruh yang paling kecil terhadap efektivitas organisasi dalam pungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, demikian pula dengan faktor komunikasi yang memiliki pengaruh yang cukup kecil. Sedangkan faktor sumber daya mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap efektivitas organisasi dalam pungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum. Struktur birokrasi merupakan faktor yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap efektivitas organisasi dalam pungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan sebagai berikut:

1. Pegawai di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya perlu membina hubungan tukar pesan antar pegawai sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman.
2. Pegawai di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya harus bisa menerima masukan-masukan dari luar sehingga masukan-masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan guna meningkatkan kinerja organisasi.
3. Setiap pegawai di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya harus memiliki tanggung jawab atas



waktu atau jam kerjanya. Artinya setiap pegawai harus dapat memanfaatkan waktu kerjanya dengan baik untuk menyelesaikan semua pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gibson, J. L. (2007). Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses. Erlangga.
- Islami, M. I. (2001). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara.
- Mangkunagara, A. . A. P. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, B. (2005). Metode Penelitian Kuantitatif. PT Rajagrafindo Persada.
- Sedarmayanti. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Mandar Maju.
- Sharma. (2002). Organizational Theory and Behaviour. Tata MC. Graw Hill Publishing Company Limited.
- Siagian, S. P. (2002). Pengambilan Keputusan Dalam Bidang Manajemen. Gramedia.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B. Alfabeta.
- Uchjana Effendy, O. (2011). Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. In Komunikasi dalam sebuah organisasi. Remaja Rosdakarya.
- Widodo, J. (2009). Analisis Kebijakan Publik. Bayumedia.
- Winarno, B. (2005). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo.